

**NALAR HUKUM *SADD AL-ZARĪ'AH* LARANGAN NIKAH
SESUKU DALAM TRADISI MASYARAKAT PARIAMAN**

DISERTASI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Doktor
Pada Program Studi Hukum Islam**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh :
**IBNU AMIN
NIM. 2320100020**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
2026 M / 1448 H**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Amin

NIM : 2320100020

Program Studi : Doktor Hukum Islam

Judul Disertasi : Nalar Hukum Sadd al- Zari'ah Larangan Nikah Sesuku
Dalam Tradisi Masyarakat Pariaman

Dengan menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam Disertasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 30 April 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Ibnu Amin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

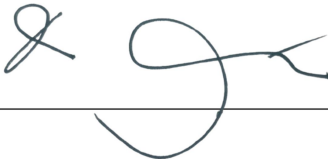
Naskah Disertasi dengan judul **Nalar Hukum Sadd Al-Zari'ah Larangan Nikah Sesuku Dalam Tradisi Masyarakat Pariaman**, disusun oleh **Ibnu Amin, NIM 2320100020**, Program Studi Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran untuk diujikan pada Ujian Tertutup.

Disahkan di : Padang

Pada tanggal : 30 April 2026

Promotor,

Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.



Co-Promotor,

Dr. M. Sholihin, M.Si.



PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI

Naskah Disertasi dengan judul **Nalar Hukum *Sadd al-Zar'ah* Larangan Nikah Sesuku Dalam Tradisi Masyarakat Pariaman**, disusun oleh **Ibnu Amin**, NIM **2320100020**, Program Studi Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi.

Disahkan di : Padang
Pada tanggal : 18 Juni 2026

Tim Penguji Sidang
Ujian Terbuka Disertasi

Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd
Penguji I / Ketua



Dr. Walan Yudhiani, M.Si.
Penguji II / Sekretaris



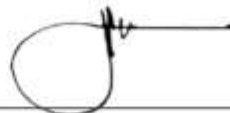
Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag
Penguji III



Prof. Dr. Elfia, M.Ag
Penguji IV



Prof. Dr. Zulfan, S.H.I., M.H.
Penguji V



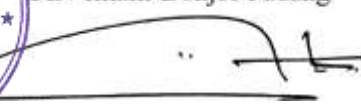
Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
Penguji VI / Promotor



Dr. M. Sholihin, M.Si
Penguji VII / Co. Promotor



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
UIN Imam Bonjol Padang


Prof. H. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D
NIP. 197112011996031002

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan disertasi dengan judul Nalar Hukum *Sadd al-Zarī'ah* Larangan Nikah Sesuku Dalam Tradisi Masyarakat Pariaman. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang telah menyampaikan pedoman kepada umat manusia menuju kehidupan yang hakiki dunia dan akhirat.

Disertasi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Prodi Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Disertasi ini jauh dari sempurna, terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dari pembaca.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam penyelesaian disertasi ini. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Prof. Ahmad Wira, M.Ag., M.Si., Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang telah memberikan dukungan dan kemudahan selama proses studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Imam Bonjol Padang.
3. Ibu Prof. Dr. Elfia, M.Ag sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sekaligus Penguji, yang telah memberikan perhatian, arahan, dan kontribusi akademik dalam penyelesaian disertasi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Zulfan, SHI., M.H sebagai Ketua Program Studi Doktor (S.3) Hukum Islam Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang sekaligus penguji, atas bimbingan dan fasilitas akademik yang sangat berarti selama

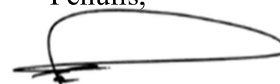
proses studi di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

5. Ibu Prof. Salma, M.Ag., Ph.D sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan bimbingan akademik selama proses studi di Program Studi Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
6. Bapak Prof. Nurur Shalihin, M.Si., Ph.D sebagai Promotor dengan penuh kesabaran telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan kontribusi ilmiah dalam penyusunan disertasi ini.
7. Bapak Dr. M. Sholihin, M.Si sebagai Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan dukungan akademik hingga disertasi ini dapat selesai dan diujikan.
8. Ketua LKAAM Kota Pariaman, Ketua KAN se-Kota Pariaman, Ketua Bundo Kanduang Kota Pariaman, serta Bundo Kanduang se-Kota Pariaman, yang telah berkenan menjadi informan dalam penelitian ini dengan memberikan data dan informasi yang sangat berharga.
9. Bapak Dr. Ruchman Basuri, M.Ag Kepala Pusat Pembiayaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (PUSPENMA) Kementerian Agama Republik Indonesia beserta tim, atas bantuan Beasiswa Penyelesaian Pendidikan (BPP) melalui program BIB-LPDP Kemenag Tahun 2025 yang sangat membantu secara finansial.
10. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I, Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup, Bapak Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum, Kepala Biro AUAK kesempatan dan motivasi selama penulis menempuh studi ini.
11. Ayahanda M. Siin. S (Alm) dan Ibunda Hj. Hasiah yang tercinta, atas kasih sayang, pendidikan, doa dan harapan senantiasa menguatkan tekad penulis untuk sampai pada jenjang studi ini.
12. Istriku tercinta Dr. Lendrawati, S.Ag., S.Pd., M.A, atas cinta, kesabaran, dan dukungan penuh lahir dan batin mendampingi penulis dalam menyelesaikan studi ini.

13. Anak-anakku tersayang Anak-anak tersayang: Y.S. Tenra Septu Amin, Lc; Muhammad Al-Faruq Amin; Abd. Rafiq Amin; Nikmah Khairiyah Amin; Jesyia Magistra Amin; dan Al-Muqhniiy Mumtaz Amin, yang menjadi sumber semangat dan inspirasi khusus bagi penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
14. Saudara kandungku kakanda Ahmad Yani, A.Md., S.HI dan Uni Gusneri, S.Pd.I (isteri) juga anak-anakku Habib, Aisyah dan Sakinah. Adikku Erma Yurneli (Almh) dan Marjidin (Suami) serta ponaanku Opis, Wilda, Gia dan Ara, atas doa dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
15. Ayahanda Mertua Sidi Usman (Alm) dan Ibunda Mertua Siti Saudah, Kakak dan Adik Ipar masing-masing suami/isteri; Cani Erlina, S.Pd dan Uda Erman, Anih Kaswirman dan Uni Dewi, Sabirin dan Ita, Andi Wirman, S.Pi., M.Si dan Yulia Fitri, S.Pi., M.Si, Muhammad Rafi, S.Pi. dan Ns.Hayati Rahmadila,S.Kep, Ns. Sriwahyuni, S.Kep. dan Dedi Salman, Ummul Fitrah, A.Md.RM. dan Hendra Mastura,S.Farm, dan Hidayatur Rafiqah, A.Md., Kesling, S.KM., M.KM dan Joni Yulisman, M.Kom atas doa dukungan moral kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini.
16. Teman seperjuangan dalam menempuh studi pada program Doktor Prodi Hukum Islam diantaranya Bang Media Eka Putra, Bang Afrizal, Uda Nursal, Uni Nurhema, Uni Yosi dan Adinda Haris Lutfhi yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian disertasi ini.

Semoga karya ilmiah ini dapat menambah wacana intelektual ke-Islaman dan khazanah pengetahuan di bidang hukum dan hukum Islam, baik di lingkungan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, maupun pemerhati dan praktisi hukum. Akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri agar setiap usaha yang kita lakukan mendapat ridho dan berkah-Nya, Aamiin.

Padang, 18 Juni 2026
Penulis,



Ibnu Amin
NIM. 2320100020

**PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA TULIS ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibnu Amin

NIM : 2320100020

Program Studi : Doktor Hukum Islam

Judul Disertasi : Nalar Hukum *Sadd al-Zarī'ah* Larangan Nikah Sesuku
Dalam Tradisi Masyarakat Pariaman

Dengan menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Program Studi Doktor Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 18 Juni 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Ibnu Amin
NIM. 2320100020

ABSTRAK

Disertasi dengan judul “Nalar Hukum *Sadd al-Zarī‘ah* Larangan Nikah Sesuku dalam Tradisi Masyarakat Pariaman” ini mengkaji praktik larangan perkawinan sesuku sebagai fenomena hukum adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Minangkabau, khususnya di Pariaman, yang tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif, tetapi tetap memiliki daya ikat sosial yang kuat. Adapun fokus pembahasannya adalah: (1) bagaimana latar belakang munculnya larangan nikah sesuku pada masyarakat Pariaman, (2) bagaimana larangan tersebut dijalankan dalam praktik sosial masyarakat, dan (3) bagaimana nilai serta prinsip kemaslahatan yang melandasi larangan tersebut dalam menjaga struktur budaya dan sosial masyarakat. Metodologi penelitian dalam disertasi ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *socio-legal* dan *normatif-empiris*, yang memadukan analisis hukum Islam (*ushul fiqh*), khususnya konsep *Sadd al-Zarī‘ah*, dengan studi hukum adat sebagai praktik sosial. Data diperoleh melalui studi lapangan di masyarakat Pariaman, wawancara dengan tokoh adat, serta analisis dokumen dan literatur yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah* dan teori nalar hukum. Berdasarkan pembahasan disertasi ini maka temuan penelitiannya menunjukkan bahwa larangan nikah sesuku berakar pada sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau yang memandang suku sebagai entitas genealogis sekaligus sosial yang harus dijaga keutuhannya. Larangan tersebut berfungsi sebagai mekanisme preventif adat untuk menghindari potensi konflik kekerabatan, menjaga harmoni sosial, serta mempertahankan struktur sosial budaya. Dalam praktiknya, larangan ini dijalankan melalui norma adat yang kuat, didukung oleh lembaga adat, serta ditegakkan melalui sanksi sosial yang bersifat moral dan kolektif. Sedangkan hasil analisis penelitian ini adalah bahwa larangan nikah sesuku dapat dipahami sebagai bentuk konkret penerapan *Sadd al-Zarī‘ah* dalam konteks hukum adat, yaitu sebagai upaya menutup jalan (*preventif*) terhadap kemungkinan terjadinya mafsadah sosial. Larangan ini termasuk dalam kategori *zarī‘ah ghālibah*, yaitu sarana yang secara dominan dipandang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial jika tidak dicegah. Selain itu, larangan tersebut memiliki relevansi dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*, khususnya dalam menjaga keturunan (*hifẓ al-nasl*), menjaga harmoni sosial, serta melindungi struktur kolektif masyarakat. Penelitian ini juga merumuskan model konseptual baru berupa “nalar hukum *Sadd al-Zarī‘ah* relasional-genealogis” sebagai bentuk integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam kerangka kemaslahatan. Kesimpulannya adalah bahwa larangan nikah sesuku dalam tradisi masyarakat Pariaman bukan sekadar norma adat, tetapi merupakan praktik penalaran hukum yang rasional, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif. Larangan tersebut memiliki legitimasi sosial dan dapat dipahami selaras dengan prinsip hukum Islam melalui pendekatan *Sadd al-Zarī‘ah* dan *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dengan demikian, hukum adat dan hukum Islam tidak selalu berada dalam posisi

konflik, melainkan dapat berinteraksi secara harmonis dalam menjaga keseimbangan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: *Nalar Hukum; Sadd al-Zarī'ah; Nikah Sesuku; Hukum Adat Minangkabau; Maqāṣid al-syarī'ah*

ABSTRACT

The dissertation entitled “Legal Reasoning of *Sadd al-zarī‘ah* on the Prohibition of Same-Clan Marriage in the Tradition of the Pariaman Community” examines the prohibition of same-clan marriage as a *living law* phenomenon within Minangkabau customary law, particularly in Pariaman, which is not explicitly regulated in Islamic law or state law but continues to possess strong social binding force. The focus of this study is: (1) to analyze the background of the emergence of the prohibition of same-clan marriage in the Pariaman community, (2) to examine how this prohibition is implemented in social practices, and (3) to explore the values and principles of public benefit (*maṣlaḥah*) underlying this prohibition in maintaining the social and cultural structure of the community. The research methodology employed in this dissertation is a qualitative approach with a socio-legal and normative-empirical framework, integrating Islamic legal analysis (*uṣūl al-fiqh*), particularly the concept of *sadd al-zarī‘ah*, with the study of customary law as a social practice. Data were collected through field research in the Pariaman community, interviews with traditional leaders, and analysis of relevant documents and literature. The data were analyzed using a descriptive-analytical method based on the framework of *maqāṣid al-sharī‘ah* and legal reasoning theory. Based on the discussion, the findings reveal that the prohibition of same-clan marriage is rooted in the matrilineal kinship system of Minangkabau, which perceives the clan as both a genealogical and social entity that must be preserved. This prohibition functions as a customary preventive mechanism to avoid potential kinship conflicts, maintain social harmony, and preserve the socio-cultural structure. In practice, this prohibition is enforced through strong customary norms, supported by traditional institutions, and reinforced by moral and collective social sanctions. Furthermore, the analysis indicates that the prohibition of same-clan marriage can be understood as a concrete application of *sadd al-zarī‘ah* within the context of customary law, serving as a preventive measure to block pathways leading to potential social harm (*mafsadah*). This prohibition falls under the category of *zarī‘ah ghālibah*, meaning a means that predominantly leads to harm if not prevented. Additionally, it aligns with the objectives of Islamic law (*maqāṣid al-sharī‘ah*), particularly in preserving lineage (*ḥifẓ al-nasl*), maintaining social harmony, and safeguarding the collective structure of society. This study also formulates a new conceptual model termed “relational-genealogical legal reasoning of *sadd al-zarī‘ah*” as an integration of customary law and Islamic law within the framework of public benefit. In conclusion, the prohibition of same-clan marriage in the Pariaman community is not merely a customary norm but represents a form of rational, contextual, and welfare-oriented legal reasoning. This prohibition possesses social legitimacy and can be understood as consistent with Islamic legal principles through the approach of *sadd al-zarī‘ah* and *maqāṣid al-sharī‘ah*. Therefore, customary law and Islamic law are not necessarily in conflict but can interact harmoniously in maintaining social balance and human values.

Keyword: *Legal Reasoning; Sadd al-zarī‘ah; Same-Clan Marriage; Minangkabau Customary Law; Maqāṣid al-sharī‘ah*

الملخص

تهدف هذه الرسالة العلمية بعنوان "الاستدلال القانوني بسدّ الذرائع في منع الزواج من نفس القبيلة في تقاليد مجتمع باريامان" إلى دراسة ظاهرة منع الزواج من نفس القبيلة بوصفها قانوناً عرفياً حياً في مجتمع ميناغكاباو، وخاصة في باريامان، وهي ظاهرة لا ينص عليها صراحة في الفقه الإسلامي ولا في القانون الوضعي، لكنها مع ذلك تمتلك قوة إلزام اجتماعي قوية. ويركز هذا البحث على: (١) تحليل الخلفية التاريخية والثقافية لظهور منع الزواج من نفس القبيلة في مجتمع باريامان، (٢) بيان كيفية تطبيق هذا المنع في الممارسات الاجتماعية، و(٣) الكشف عن القيم ومبادئ المصلحة الكامنة وراء هذا المنع في الحفاظ على البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمع. تعتمد منهجية هذا البحث على المنهج الكيفي من خلال مقارنة سوسيو-قانونية والقانون التجريبي، حيث يجمع بين تحليل أصول الفقه، خاصة مفهوم سدّ الذرائع، ودراسة القانون العرفي باعتباره ممارسة اجتماعية. وقد تم جمع البيانات من خلال الدراسة الميدانية في مجتمع باريامان، والمقابلات مع زعماء العرف، وتحليل الوثائق والمراجع ذات الصلة. وتم تحليل البيانات باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في إطار مقاصد الشريعة ونظرية الاستدلال القانوني. وتبين نتائج البحث أن منع الزواج من نفس القبيلة يستند إلى نظام القرابة الأمومي في مجتمع ميناغكاباو، حيث تُفهم القبيلة بوصفها كياناً نسبياً واجتماعياً ينبغي الحفاظ عليه. ويعمل هذا المنع كآلية وقائية عرفية تهدف إلى تجنب النزاعات الأسرية، والحفاظ على الانسجام الاجتماعي، وصيانة البنية الاجتماعية والثقافية. كما يُطبق هذا المنع من خلال أعراف قوية تدعمها المؤسسات التقليدية، ويُعزز بواسطة العقوبات الاجتماعية ذات الطابع الأخلاقي والجماعي. أما نتائج التحليل فتشير إلى أن منع الزواج من نفس القبيلة يمكن فهمه بوصفه تطبيقاً عملياً لمبدأ سدّ الذرائع في إطار القانون العرفي، حيث يُعد وسيلة وقائية لمنع الوقوع في المفاصل الاجتماعية المحتملة. ويصنّف هذا المنع ضمن الذرائع الغالبة التي يُرجّح أن تؤدي إلى مفسدة إذا لم تُمنع. كما يتوافق مع مقاصد الشريعة، خاصة في حفظ النسل (حفظ النسل)، والحفاظ على الانسجام الاجتماعي، وصيانة البنية الجماعية للمجتمع. كما يقدّم البحث نموذجاً مفاهيمياً جديداً يُسمّى "الاستدلال القانوني بسدّ الذرائع العلانقي-النسبي" بوصفه تكاملاً بين القانون العرفي والقانون الإسلامي في إطار تحقيق المصلحة. وخلاصة القول أن منع الزواج من نفس القبيلة في مجتمع باريامان ليس مجرد قاعدة عرفية، بل هو ممارسة للاستدلال القانوني تتسم بالعقلانية والسياقية وتركز على تحقيق المصلحة العامة. كما أن هذا المنع يمتلك شرعية اجتماعية، ويمكن فهمه على أنه منسجم مع مبادئ الشريعة الإسلامية من خلال مقارنة سدّ الذرائع ومقاصد الشريعة. وبذلك، فإن القانون العرفي والقانون الإسلامي لا يتعارضان بالضرورة، بل يمكن أن يتكاملا في تحقيق التوازن الاجتماعي والقيم الإنسانية.

الكلمات المفتاحية: الاستدلال القانوني؛ سدّ الذرائع؛ الزواج من نفس القبيلة؛ القانون العرفي لميناغكاباو؛ مقاصد الشريعة

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR/SKEMA	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	3
1.3.Pertanyaan Penelitian	3
1.4.Tujuan Penelitian	3
1.5.Manfaat Penelitian	4
BAB II LITERATUR REVIEW DAN KERANGKA TEORI	6
2.1.Literatur Review: Berbasis Scoping Review.....	6
2.1.1. Klasifikasi Kajian Terdahulu	6
2.1.2. Sejumlah Kritik Terhadap Kajian Terdahulu.....	21
2.1.3. Argumentasi Kontribusi Penelitian	26
2.2.Kerangka Teori	28
2.2.1. <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dalam Ushul Fiqh	28
2.2.1.1.Pengertian dan Dasar Konseptual <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	29
2.2.1.2.Klasifikasi al-Zarī'ah dan Tingkat Mafsadah	32
2.2.1.3.Kehujjahan <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dalam Penetapan Hukum	35
2.2.1.4.Batas Legitimasi <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dalam Konteks Hak Individu	37
2.2.1.5. <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dan <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	43
2.2.2. Nalar Hukum	45
2.2.2.1.Pengertian Nalar Hukum	45
2.2.2.2.Nalar Hukum dalam Perspektif Ronald Dworkin	47
2.2.2.3.Nalar Hukum sebagai Proses Sosial dan Kultural....	50
2.2.2.4.Nalar Hukum dalam Perspektif Hukum Adat.....	51
2.2.2.5.Pengaruh Nalar Hukum Adat terhadap Larangan Nikah Sesuku	52
2.2.2.6.Nalar Hukum dan Perubahan Sosial.....	53
2.2.3. Hukum Perkawinan Adat Pariaman.....	53
2.2.4. Larangan Perkawinan Dalam Islam	58

BAB III	METODE PENELITIAN	63
3.1.	Desain dan Jenis Penelitian	63
3.2.	Lokasi dan Konteks Sosial Penelitian	63
3.3.	Fokus dan Objek Penelitian.....	68
3.4.	Subjek dan Informan Penelitian.....	68
3.5.	Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.5.1.	Sumber Data	69
3.5.2.	Teknik Pengumpulan Data	69
3.6.	Teknik Analisa Data.....	70
3.7.	Keabsahan Data	72
3.8.	Instrumen Penelitian.....	72
3.9.	Etika Penelitian	73
BAB IV	TEMUAN PENELITIAN	72
4.1.	Latar belakang Munculnya Larangan Nikah Sesuku Pada Masyarakat Pariaman	74
4.1.1.	Kulturalisme dan Diversifikasi Etnis Pada Masyarakat Pariaman.....	77
4.1.2.	Suku sebagai Kesatuan Kekerabatan Adat; Dasar Penalaran Larangan Perkawinan.....	82
4.1.3.	Asal Usul Tradisi Larangan Nikah sesuku	87
4.1.4.	Faktor Historis dan Budaya	94
4.1.5.	Dinamika dan Perubahan	99
4.2.	Praktek Larangan nikah Sesuku di Masyarakat Pariaman	105
4.2.1.	Konsep Sesuku dan Batas Genealogis dalam Praktik Adat Masyarakat Pariaman.....	105
4.2.2.	Variasi Penerapan Larangan Nikah sesuku Antar Nagari di Kota Pariaman.....	109
4.2.3.	Pelaksanaan dan Sanksi Sosial terhadap Pelanggaran Larangan Nikah sesuku di Pariaman.....	114
4.2.4.	Peran Lembaga Adat dan Keluarga dalam Pelarangan Nikah sesuku Masyarakat Pariaman.....	119
4.2.5.	Sikap Masyarakat tentang Larangan Nikah Sesuku	122
4.2.6.	Tipologi Nikah Sesuku dalam Masyarakat Pariaman	126
4.3.	Nilai dan Prinsip Kemaslahatan dibalik Larangan nikah Sesuku Terhadap Struktur Budaya dan Sosial di Pariaman	129
4.3.1.	Nilai yang Mendasari Larangan Nikah Sesuku dalam Masyarakat Pariaman.....	130
4.3.2.	Prinsip yang Bekerja dalam Larangan Nikah Sesuku.....	134
4.3.3.	Implikasi Hukum dan Sosial Nikah sesuku Masyarakat Pariaman.....	139
BAB V	<i>SADD AL-ZARĪ'AH</i> LARANGAN NIKAH SESUKU DALAM TRADISI MASYARAKAT PARIAMAN	146
5.1.	Nalar Hukum <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dalam Latar Belakang Larangan Nikah Sesuku pada Tradisi Masyarakat Pariaman	146
5.1.1.	Posisi <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dalam Peta Nalar Hukum Islam	148

5.1.1.1.Nalar <i>Bayānī</i>	149
5.1.1.2.Nalar <i>Ta'īlī (Qiyasi)</i>	152
5.1.1.3.Nalar <i>Istiṣlāhī</i>	154
5.1.1.4.Nalar <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	157
5.1.1.5.Posisi <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dalam Memahami Larangan Nikah Sesuku	160
5.1.2.Konsep <i>Sadd al-zarī'ah</i> dalam Teori Hukum Islam	166
5.1.3.Karakter Nalar Preventif dalam <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	168
5.1.4.Relevansi <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dalam Konteks Sosial	169
5.1.5.Larangan Nikah Sesuku sebagai Nalar Preventif dalam Perspektif <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	173
5.2.Larangan Nikah Sesuku sebagai Praktik <i>Sadd al-zarī'ah</i> dalam Hukum Adat Masyarakat Pariaman.....	175
5.2.1.Konsep Sesuku dan Batas Genealogis sebagai Dasar Pencegahan	177
5.2.2.Variasi Penerapan Larangan sebagai Bentuk Fleksibilitas <i>Sadd al-Zarī'ah</i>	178
5.2.3.Sanksi Sosial sebagai Mekanisme Preventif dan Kontrol Sosial	180
5.2.4.Peran Lembaga Adat sebagai Otoritas Nalar Preventif	182
5.2.5.Sikap Masyarakat sebagai Basis <i>Living law</i> Preventif.....	184
5.3.Kemaslahatan Sosial dalam Perspektif <i>Maqasid al-Syari'ah</i>	187
5.3.1.Konsep <i>Maqasid al-Syari'ah</i> dalam Pendekatan Jasser Auda	189
5.3.2.Kemaslahatan Sosial dalam Larangan Nikah Sesuku	191
5.3.3.Hubungan <i>Sadd al-Zarī'ah</i> dan <i>Maqasid al-Syari'ah</i> dalam Larangan Nikah Sesuku	193
5.3.4.Larangan Nikah Sesuku Sebagai Realisasi <i>Maqasid</i> Sosial.....	196
5.4.Reformulasi Konseptual: Model Nalar Hukum <i>Sadd al-Zarī'ah</i> Relasional - Genealogis.....	196
5.4.1.Kritik terhadap Teori Nalar Hukum Modern.....	196
5.4.2.Karakter Nalar Hukum Adat Pariaman	199
5.4.3.Formulasi Nalar Hukum <i>Sadd al-Zarī'ah</i> Relasional – Genealogis.....	199
5.4.4.Unsur-unsur Model Nalar Hukum <i>Sadd al-Zarī'ah</i> Relasional – Genealogis.....	202
5.4.5.Implikasi Teoretik Model <i>Sadd al-Zarī'ah</i> Relasional – Genealogis.....	203
BAB VI PENUTUP	205
6.1.Kesimpulan	205
6.2.Rekomendasi.....	206
6.3.Implikasi Penelitian.....	207
6.4.Keterbatasan Studi	207
DAFTAR PUSTAKA	209
PROFIL PENULIS	219